

Merasa Dilecehkan Anggota Dewan Relawan Bantul Geruduk Gedung DPRD



KR-Judiman

Sambil membawa peti mati, ratusan relawan menyampaikan orasi di depan Gedung DPRD Bantul.

BANTUL (KR) - Ratusan relawan anggota Forum Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) se-

Kabupaten Bantul dan relawan lainnya, Senin (22/2) menggeruduk Gedung DPRD Bantul. Kedatang-

an mereka untuk mencari salah satu anggota DPRD setempat Drs Supriyadi MSi, warga Sawahan Tri-

murti Srandakan.

Mereka datang ke DPRD Bantul sambil membawa peti mati bergambar Supri-

yadi atau Supri Kantong, untuk menuntut pertanggungjawaban Supriyadi yang dinilai telah melecehkan dan menyakiti hati para relawan di Kabupaten Bantul terkait penanganan dan pemakaman jenazah korban Covid-19.

Akhir-akhir ini Supriyadi ketika memberikan tausiah di acara pengajian atau ketika diminta memberikan *ular-ular* (sambutan) dalam resepsi hajatan pernikahan sering menearngkan tentang penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Hanya saja dalam tausiahnya itu, anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyebutkan, saat pemakaman jenazah korban Covid-19 diberlakukan seperti menguburkan hewan anjing dan menuduh ada dinas yang memanfaatkan untuk proyek Covid-19.

Menurut para relawan, yang dikoordinir ketuanya, Waljito SH, sebenarnya ucapan Supriyadi tersebut sudah sering diingatkan

*** Bersambung hal 7 kol 5**



Analisis KR

Memroses Pengaduan

Dr. Achiel Suyanto S

PRESIDEN Joko Widodo meminta Kapolri agar meningkatkan pengawasan terhadap implementasi penegakan UU-ITE. Tentu agar berjalan secara konsisten, akuntabel dan menjamin rasa keadilan masyarakat. Polisi harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya serta untuk melindungi kepentingan yang lebih luas. Karena Presiden mensinyalir akhir-akhir ini UU-ITE telah menjadi rujukan hukum dalam setiap ada pelaporan hukum. Akibatnya proses hukum kadang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan,

Jajaran Kepolisian diminta lebih selektif. Menurut Presiden pasal-pasal dalam UU-ITE sebagian masih multitafsir, sehingga penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkannya. Presiden bahkan berharap bila dianggap perlu DPR bisa merevisi UU ITE tersebut terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya berbeda-beda dan mudah diinterpretasikan secara sepihak.

Presiden sangat memahami bahwa UU-ITE itu dibuat untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat dan beretika dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Sudah semestinya UU-ITE dapat diimplementasikan secara adil. Realitanya yang terjadi sekarang, justru UU ITE dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Untuk itu Presiden meminta

*** Bersambung hal 7 kol 1**

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:55	15:00	18:14	19:14	04:27
Selasa, 23 Februari 2021 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY					



DOMPET 'KR'

Bersama Kita Melawan Virus Korona

Migunani Tumraping Liyan

MARI kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri maupun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ibu para dermawan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuangan KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasional dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening BCA **126.556.5656** atas nama BP Kedaulatan Rakyat PT. (Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA **081 2296 0972**).

Berikut dermawan yang sudah menyumbang:

NO	NAMA	ALAMAT	RUPIAH
	Melalui Transfer		
829	Niken		150.000.00
	JUMLAH	Rp	150.000.00
s/d 21 Februari 2021 Rp 444,270,000.00			
s/d 22 Februari 2021 Rp 444,420,000.00			
(Empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)			
(Siapa menyusul?)			

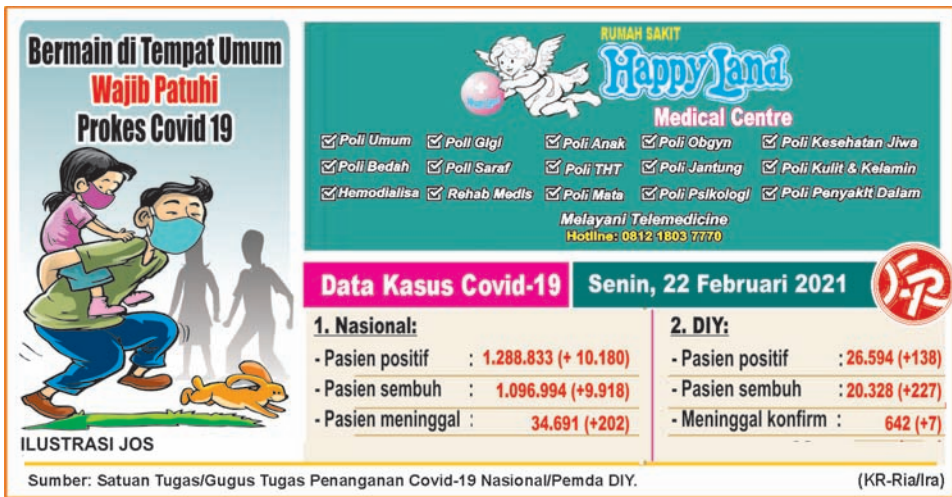
KASUS COVID-19 MASIH FLUKTUATIF DIY Perpanjang PPKM Mikro

YOGYA (KR) - Pemda DIY memutuskan untuk memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dari 23 Februari hingga 8 Maret 2021. Keputusan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur DIY Nomor 6/INST/2021 yang mengatur secara detail beberapa poin tentang PPKM Mikro, meski sebetulnya keputusan untuk memperpanjang PPKM itu di tangan Pemerintah Pusat dan berlaku di

Pulau Jawa dan Bali.

"Karena Pemerintah Pusat memperpanjang, otomatis daerah (DIY) juga diperpanjang. Memang dalam beberapa waktu terakhir sempat terjadi penurunan jumlah kasus Covid-19. Tapi karena tren perkembangan kasus masih fluktuatif, jadi kami putuskan untuk memperpanjang PPKM Mikro. Selain itu, DIY juga dikelilingi zona merah, sehingga jika tidak ada

*** Bersambung hal 7 kol 1**



GHUFRON RESMI PIMPIN BPJS KESEHATAN Fokus Peningkatan Kualitas Layanan

JAKARTA (KR) - Ali Ghufron Mukti dan Achmad Yurianto resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Istana Negara, Senin (22/2). Ali Ghufron Mukti meyakini bahwa jajaran direksi baru akan fokus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Pelantikan itu menyusul terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) 37/P 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021-2026. Turut hadir saat pelantikan antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordi-



KR-Istimewa

Ali Ghufron mendapatkan ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo.

nator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Kesehatan Budi Sadikin.

Mantan Wakil Menteri Kesehatan Era Presiden SBY ini, berjanji ingin meningkatkan dan fokus ke-

pada kualitas layanan dengan mengurangi antrean pelayanan. "Kami juga ingin meningkatkan dan fokus kepada kualitas layanan. Sehingga kualitas akan meningkat. Keseluruhan customer journey akan kita tingkatkan de-

KUDUS KERAHKAN POMPA PENYEDOT AIR Banjir Pekalongan Belum Surut



KR-Antara/Harvian Perdana Putra

Warga terdampak banjir berbelanja di pedagang sayuran keliling yang menggunakan perahu di Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (22/2).

PEKALONGAN (KR) - Pemkot Pekalongan, Jawa Tengah, menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana selama empat hari ke depan, menyusul hasil evaluasi dan melihat kondisi banjir yang belum surut.

Walikota Pekalongan terpilih Afzan Arslan Djunaid, Senin (22/2) mengatakan, semula status tanggap darurat berlaku hingga 20 Februari 2021, tetapi dengan hasil evaluasi dan melihat kondisi banjir yang belum surut maka diperpanjang hingga 14 hari ke depan.

"Surat perpanjangan status tanggap darurat itu sementara ditandatangani oleh Pelaksana Harian Walikota karena jabatan walikota sudah berakhir pada 17 Februari 2021, sedangkan jabatan walikota terpilih belum dilantik," katanya.

Kendati demikian, kata Afzan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bahwa situasi tanggap darurat di Pekalongan memang harus diperpanjang.

Menurutnya, pada perpanjangan status tanggap darurat bencana ini yang menjadi kendala karena jabatan walikota dan wakil walikota sebelumnya sudah berakhir pada 17 Februari 2021, sedangkan walikota terpilih baru akan dilantik 26 Februari 2021.

Namun, kata Afzan, Plh Walikota Pekalongan secara aturan birokrasi tidak bisa menerbitkan surat untuk perpanjangan status tanggap darurat. Ia mengatakan dengan melihat situasi darurat dan warga masih

*** Bersambung hal 7 kol 1**

CUTI BERSAMA KEMBALI DIPANGKAS Dari 7 Hari Jadi 2 Hari

JAKARTA (KR) - Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021 sebanyak 2 hari saja. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Senin (22/2).

"Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti bersama. Setelah dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula 7 hari menjadi hanya tinggal 2 hari saja" ujar Menko PMK dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemmenko PMK, Jakarta pada Senin (22/2).

Adapun cuti bersama tahun 2021 yang dipangkas sebanyak 5 hari, yakni 12 Maret: Cuti Bersama dalam rangka Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW, 17, 18, 19 Mei: Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan 27 Desember: Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Natal 2021.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

ngan inovasi teknologi interface sistem informasi. Sehingga antrean tidak lagi sekitar 6 jam tapi bisa lebih cepat," katanya sesuai dilantik di Istana Negara, Jakarta Senin (22/2).

Selain itu Ghufron mengatakan ingin meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Ghufron juga ingin meningkatkan rasa keterikatan semua pihak terhadap BPJS Kesehatan. "Keterlibatan semua pihak baik pusat, daerah asosiasi, pengamat, perguruan tinggi untuk bersama-sama memiliki BPJS atau jaminan kesehatan nasional dan kartu Indonesia sehat atau JKN KIS," katanya.

Pihaknya ingin menekan defisit aset BPJS Kesehatan dengan pengelolaan yang lebih baik. "Kami ingin meningkatkan sus-

tainabilitas dari sistem jaminan ini dengan dana yang cukup. Yang kemarin sudah disampaikan

*** Bersambung hal 7 kol 1**



● **KETIKA** sekolah kami sibuk persiapan akreditasi perpustakaan, kami berencana belanja buku, salah satunya sastra. Di group WA guru dan karyawan kemudian memposting salah satu buku yang akan dibeli: *Musyawah Burung*. Salah satu karyawan TU menulis komentar, "Napa bermasalah dengan budungnya, Pak Guru, kok pado musyawah". (Sukardi Guru SMK Maarif 3 Wates, Cla-wer RT 035 RW 014 Pengasih, Kulonprogo 55652)-f